

## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI BAGI PETANI DI KECAMATAN SUNGAI TARAB

Indah Defita<sup>1(a)</sup>, M. Fachri Adnan<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang  
<sup>a)</sup>idefita80@gmail.com, <sup>b)</sup>fachri.adnan@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

31-01-2023

Diterbitkan Online:

01-03-2023

#### Kata Kunci:

Evaluasi, Pupuk Bersubsidi,  
Petani

#### Keywords:

Evaluation, Subsidized  
Fertilizer, Farmers

#### Corresponding Author:

idefita80@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sungai Tarab yaitu harga pupuk bersubsidi lebih mahal dibanding akan HET, pupuk bersubsidi yang kurang mencukupi kebutuhan petani dan keterlambatan penyaluran pupuk subsidi. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan analisis pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Kecamatan Sungai Tarab. Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni kualitatif deskriptif dan penetapan informan penelitian menggunakan purposive sampling. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kecamatan Sungai Tarab. Teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat teknik wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data memakai teknik triangulasi sumber melalui cara pelaksanaan pengecekan pada data yang diraih melalui sejumlah sumber. Data yang terkumpul lalu di transkrip, dibaca ulang dan kemudian ditarik kesimpulannya. Hasil dari penelitian memperlihatkan dimana pelaksanaan program peyaluran pupuk bersubsidi untuk petani di Kecamatan Sungai Tarab terdapat empat faktor yang mencakup atas komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

### ABSTRACT

This motivation of research was the issues of distributing subsidized fertilizers in Sungai Tarab District, namely the price of subsidized fertilizers is higher than the HET, subsidized fertilizers are not sufficient to meet the farmers needs and delays in the distribution of subsidized fertilizers. This research was conducted with the aim of conducting an implementation analysis and evaluation of the implementation of the subsidized fertilizer distribution program for farmers in Sungai Tarab District. The research method was descriptive qualitative and determining research informants using purposive sampling. The research location was conducted in Sungai Tarab District. The techniques for data collection were conducted through techniques by interview and documentation studies. Validity test of the data utilizing the source triangulation technique by cross-referencing data gathered from several sources. The collected data is then transcribed, re-read and then conclusions drawn. The results of the study show that the implementation of the subsidized fertilizer distribution program for farmers in Sungai Tarab Subdistrict has four factors which include communication, resources, attitude of implementers and bureaucratic structure.

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.606>

## PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk di Indonesia mencari nafkah pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor penting dari perekonomian Indonesia. Dalam upaya meningkatkan produktifitas pertanian, pupuk memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung sektor pertanian. Namun, banyak dijumpai para petani kejadian langkanya dan mahalnnya harga pupuk.

Pemerintah menerapkan program pupuk untuk petani melalui pupuk bersubsidi sebagai upaya untuk mendistribusikan pupuk dan mempermudah petani mendapatkan pupuk (Jorgi, Gayatri&Dalmyiatun, 2019). Subsidi pupuk merupakan kebijakan nasional yang mempunyai tujuan dalam memberikan bantuan bagi pad upaya pemenuhan pupuk yang diperlukan melalui harga yang bisa dijangkau supaya bisa menunjang peningkatan produksi dari pertanian dan menunjang hasil dan juga melakukan perbaikan untuk kesejahteraan.

Pelaksanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dijalankan sejalan terhadap ketetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Sektor Pertanian. Pada ketetapan tersebut dalam pasal 1 Pupuk bersubsidi adalah barang yang disponsori pemerintah yang pengadaan dan penyalurannya sebagai pemenuhan apa yang kelompok tani dan/atau petani di bidang pertanian perlukan, seperti pupuk urea, pupuk SP36, Pupuk Za, Pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi yang lain.

Penyaluran pupuk terhadap petani dilaksanakan melalui pengecer resmi yang sudah diamanahkan pada wilayah kerjanya mengacu terhadap data cetak e-RDCK, Melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) Tertinggi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi.

Kecamatan Sungai Tarab ialah satu diantara kecamatan pada Kabupaten Tanah Datar yang memiliki luas kawasan 71,85 Km<sup>2</sup>. Pada penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi Kecamatan Sungai Tarab memiliki jumlah kelompok tani sebanyak 113 kelompok, yang tersebar di sepuluh nagari.

Pada penyelenggaraan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sungai Tarab masih ditemukan beberapa permasalahan seperti harga dari pupuk bersubsidi lebih mahal dibanding

akan Harga Eceran Tertinggi yang sudah diatur, untuk HET pupuk Urea Rp. 112.500 dikios pengecer dijual Rp. 135.00 dan HET pupuk NPK Rp. 115.000 dikios pengecer dijual seharga Rp. 140.000. Pupuk bersubsidi yang kurang mencukupi kebutuhan petani, karena jumlah alokasi pupuk yang diajukan melalui RDCK tidak sepenuhnya terealisasi dan keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi.

Tujuan dari penelitian ini yakni melakukan evaluasi dari penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani pada Kecamatan Sungai Tarab.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif melalui penggunaan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penetapan informan penelitian menggunakan *purposive sampling* yaitu orang-orang yang memahami konteks permasalahan penelitian ini. Adapun informan penelitian ditetapkan yakni Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Balai Pertanian Kecamatan Sungai Tarab, pemilik kios pengecer dan petani yang menerima pupuk bersubsidi. Adapun teknik pada upaya mengumpulkan data memakai teknik wawancara dan studi dokumentasi. Dalam melakukan uji kebenaran data peneliti memakai teknik triangulasi sumber melalui cara pelaksanaan pengecekan pada data yang sudah diraih melalui sejumlah sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kecamatan Sungai Tarab

Dalam penelitian ini untuk melihat faktor yang memberikan pengaruh pada penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Sungai Tarab, penulis menggunakan teori yang diungkapkan oleh George E Edwards III dalam Abdoellah (2016) ada empat faktor yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksanaan dan struktur birokrasi.

#### a) Komunikasi

Hasil dari penelitian memperlihatkan dimana komunikasi antara pihak yang menyangkut pada penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Sungai Tarab telah terjalankan secara baik. Komunikasi mencakup atas komunikasi yang

dilaksanakan dari para pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Adanya pertemuan sesama BPP se Kabupaten Tanah Datar, dan untuk komunikasi Balai Penyuluhan Kecamatan dengan kios pengecer adanya pertemuan dan adanya grup whatsapp untuk melakukan komunikasi.

Komunikasi ialah satu diantara faktor besar yang memberikan pengaruh akan kesuksesan penyelenggaraan aturan. Menurut Edwards dalam Abdoellah (2016) yang memberikan pernyataan dimana komunikasi yang bagus bisa membentuk sebuah tujuan melalui aturan publik.

Hal ini sesuai terhadap hasil penelitian sebelumnya oleh Ilham, Fachri dan Nora (2019) dimana penyelenggaraan program bus sekolah tidak berbayar dari UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau pada bidang komunikasi penyaluran informasi program sudah dilaksanakan secara baik.

#### b) Sumber Daya

Sumber daya ialah komponen paling penting pada implementasi sebuah aturan. Edward dalam Abdoellah (2016) sumber daya mencakup atas sumber daya manusia, sumber daya anggaran, wewenang dan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian sumber daya manusia untuk penyuluh pertanian di Balai Penyuluh Pertanian belum mencukupi dari segi jumlah karena hanya ada tujuh penyuluh untuk sepuluh nagari, tidak sesuai dengan aturannya yaitu satu nagari satu penyuluh. Sumber daya manusia menurut Edwards dalam Abdoellah (2016) yakni kecukupan para implementor kebijakan. Sumber daya manusia pada penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani pada Kecamatan Sungai Tarab belum sesuai dengan pendapat Edwards dalam Abdoellah (2016) karena sumber daya manusia untuk penyuluh pertanian di Balai Penyuluh Pertanian belum mencukupi.

Hasil dari penelitian memperlihatkan dimana sumberdaya anggaran pada penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani pada Kecamatan Sungai Tarab belum memadai sehingga tidak mampu memenuhi semua kebutuhan petani akan pupuk. Sumber daya anggaran menurut Edwards dalam Abdoellah (2016) adalah kecukupan anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya

anggaran pada penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani pada Kecamatan Sungai Tarab belum sesuai dengan pendapat Edwards dalam Abdoellah (2016) karena sumber daya anggaran belum mencukupi sehingga tidak mampu memenuhi semua kebutuhan petani akan pupuk.

Sumber daya peralatan pada penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani pada Kecamatan Sungai Tarab yakni aplikasi T-Pubers yang merupakan aplikasi pelaporan yang digunakan oleh pemilik kios untuk melaporkan pendistribusian atau penjualan setiap bulan. Aplikasi ini sangat membantu karena pelaporan lebih jelas, transparans, mengurangi penyimpangan pupuk, dan penyaluran pun lebih tepat sasaran.

Sumber daya peralatan menurut Edwards dalam Abdoellah (2016) merupakan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran program pupuk bersubsidi di Kecamatan Sungai Tarab yaitu aplikasi T-Pubers yang merupakan aplikasi pelaporan yang digunakan pemilik pendistribusian atau penjualan setiap bulan.

Hasil dari penelitian memperlihatkan dimana kewenangan masing-masing pelaksana program untuk menyalurkan pupuk bersubsidi untuk petani pada Kecamatan Sungai Tarab mencakup atas Tim Pembina pupuk dan pestisida di Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar memiliki wewenang melakukan sosialisasi, memonitoring dan pengawasan, melakukan verifikasi dan validasi data RDKK serta pembagian alokasi pupuk perkecamatan, penyuluh pertanian kemewenangannya memfasilitasi program dengan melakukan sosialisasi kepada petani, mengumpulkan data petani dan menyusun RDKK. Sedangkan wewenang pemilik kios adalah sebagai tempat penjualan pupuk bersubsidi, menjual pupuk bersubsidi terhadap para petani sejalan terhadap ketentuan yang diakui dan membuat pelaporan penyaluran pupuk.

Sumber daya kewenangan menurut Edwards dalam Abdoellah (2016) aturan yang memadai dalam membentuk keputusan sendiri yang implementor miliki akan memberikan pengaruh akan implementor itu pada penyelenggaraan kebijakan. Jika dikaitkan dengan Semua kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana pada penyelenggaraan program

untuk menyalurkan pupuk bersubsidi bagi petani pada Kecamatan Sungai Tarab sudah melaksanakan dengan baik dan pelaksana pun mampu membuat keputusan apabila dilapangan ditemukan kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Menurut Edward dalam Abdoellah (2016) Sumber daya ialah komponen krusial pada penyelenggaraan aturan publik. Dari empat indikator sumberdaya yang ada sumber daya manusia dan anggaran belum memadai pada penyelenggaraan program peyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Sungai Tarab.

#### c) Sikap Pelaksana

Hasil dari penelitian memperlihatkan dimana sikap pelaksana pada penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani pada Kecamatan Sungai Tarab para pelaksana sudah bersikap baik dan menjalankan tanggung jawab sebaik mungkin, namun untuk penyuluh pertanian perlu ditingkatkan lagi.

Disposisi atau sikap pelaksana ialah besarnya tingkat keberhasilan dari penerapan aturan. Menurut Edrward dalam Abdoellah (2016) sikap pelaksana yaitu kecendrungan dari yang menjalankan aturan sebagai komponen yang memiliki kedudukan penting untuk penetapan aturan publik. Apabila pihak yang melaksanakan memperlihatkan sikap bagus akan sebuah turan khusus (terdapat dukungan) maka mereka akan menjalankan aturan seperti yang diinginkan oleh pihak yang membuat aturan, sebaliknya ketika sikap mereka tidak sejalan maka penerapan tidak akan terlaksana secara baik.

Para pelaksana kebijakan telah bersikap baik terhadap program pupuk bersubsidi bagi petani di Kecamatan Sungai Tarab, dalam hal ini telah sesuai dengan pendapat Edward dalam Abdoellah (2016) telah adanya dukungan, besar kemungkinan para yang menjalankan aturan sudah menjalankan aturan seperi yang diinginkan oleh pihak yang membuat aturan.

#### d) Struktur Birokrasi

Menurut Edwards dalam Abdoellah (2016) struktur birokrasi yang bertugas dalam mengimpelemtasikan kebbijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan akan impelementasi aturan. Struktur dari organisasi yang sangat berbelit-belit akan mempunyai kecendrungan membuat lemahnya proses untuk mengawasi dan membuat *red-tape*, yaitu struktur birokrasi yang berbelit-belit dan sangat

komplit. Satu diantara aspek birokrasi yakni standar operasional prosedur (SOP).

Jika dikaitkan dalam penelitian ini pihak-pihak yang terlibat yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sungai Tarab dan pemilik kios. Semua pihak yang terlibat telah berkompten dan memiliki kualitas yang baik. Untuk pemilik kios memiliki syarat atau SOP seperti Untuk pemilik kios pengecer memiliki Strandar Operasional Prosedur (SOP) yaitu pemilik kios mesti mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai dana yang cukup.

### Evaluasi Pelaksanaan Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kecamatan Sungai Tarab

Evaluasi pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani pada Kecamatan Sungai Tarab dianalisa menggunakan teori Dunn (2003) yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

#### a) Efektifitas

Hasil dari penelitian memperlihatkan dimana penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sungai Tarab belum mencapai tujuan sepenuhnya. Pada tujuan penyaluran pupuk bersubsidi tepat harga belum terwujud disebabkan tersedianya biaya penambah yang diberikan oleh yang mempunyai kios, seperti biaya sewa kios, dan biaya transportasi, sehingga terjadinya penyelewengan harga yang dilakukan oleh pemilik kios pengecer. Harga dari pupuk bersubsidi pada kios pengecer dilakukan penjualan lebih mahal dibandingkan akan harga eceran paling tinggi yang sudah diatur pemerintah. Ini mengidentifikasi bahwa petani menebus pupuk subsidi tidak mendapatkan subsidi sepenuhnya.

**Tabel 1. Perbandingan Harge Eceran Tertinggi dan Harga jual pupuk bersubsidi di Kecamatan Sungai Tarab**

No	Jenis Pupuk	Harga Eceran Tertinggi	Harga Jual di Kios	Selisih Harga
1	Urea	Rp. 112.500	Rp. 135.000	Rp. 22.500
2	NPK	Rp. 115.00	Rp. 140.000	Rp. 25.000

Selanjutnya penyaluran pupuk bersubsidi tepat jumlah belum terwujud karena jumlah pupuk yang terealisasi kurang dari jumlah pupuk yang diajukan dalam RDKK, hanya mampu memenuhi 30% dari kebutuhan petani. Kemudian penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu juga belum terwujud, tepat waktu dapat diartikan bahwa pupuk bersubsidi harus tersedia saat diperlukan petani. Hasil penelitian menunjukkan pupuk tidak selalu tersedia saat petani membutuhkan, hal ini disebabkan pupuk yang datang ke pemilik kios setelah penebusan itu harus menunggu beberapa hari, sehingga membuat stock di kios pengecer tidak ada. Sedangkan untuk tujuan tepat tempat, jenis dan mutu sudah terpenuhi.

Efektifitas menurut Dunn (2003) ialah apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan diadakan tindakan. Efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan. Dunn (2003) menyatakan pencapaian tujuan ialah diraihnya tujuan yang diinginkan pada formulasi ketetapan. Tujuan program penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sebagai bagian dalam memperkuat ketahanan pangan nasional yang harus memenuhi dasar 6 Tepat yakni tepat dari segi kuantitatif, jenis, harga, waktu, lokasi dan kualitas. Apabila dihubungkan terhadap penelitian ini penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Sungai Tarab belum sepenuhnya tercapai, untuk tujuan tepat tempat, jenis dan mutu sudah terwujud. Sedangkan untuk tujuan tepat harga, waktu dan jumlah belum terwujud, hal ini menunjukkan bahwa belum efektifnya penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Sungai Tarab.

Hal ini sejalan terhadap penelitian terdahulu Sri Wahyuni (2022) dimana belum efektifnya pembagian pupuk bersubsidi untuk petani dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang disebabkan belum seluruh prinsip tujuan atas ketetapan dijalankan sesuai terhadap ketetapan yang diputuskan.

#### b) Efisiensi

Dalam meninjau kriteria efisiensi, pada penelitian ini memakai indikator melalui sumber daya manusia dan anggaran. Hasil penelitian memperlihatkan sumber daya manusia pada penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan

Sungai Tarab belum mencukupi disebabkan banyaknya penyuluh pertanian di Balai Pertanian Kecamatan Sungai Tarab hanya ada tujuh penyuluh untuk sepuluh nagari dengan jumlah petani yang cukup banyak. Sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah para penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Sungai Tarab. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Edwards dalam Abdoellah (2016) sumber daya manusia adalah kecukupan para implementor kebijakan.

Sumber daya anggaran pada penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani pada Kecamatan Sungai Tarab belum memadai, disebabkan terbatasnya anggaran menyebabkan tidak terpenuhinya semua kebutuhan pupuk petani. Sumber daya anggaran menurut Edwards dalam Abdoellah (2016) kecukupan anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya anggaran dalam menyelenggarakan program penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sungai Tarab belum sesuai dengan pendapat yang dikemukakan karena dana untuk program yang belum mencukupi.

Menurut Dunn (2003) efisiensi menyangkut terhadap banyaknya upaya yang dibutuhkan dalam menciptakan tingkat efektifitas khusus. Di Kecamatan Sungai Tarab walaupun sudah dilaksanakan upaya penyelenggaraan program namun ditinjau melalui segi sumber daya manusia dan anggaran tidak tercukupi sehingga tidak terciptanya efisiensi.

#### c) Kecukupan

Kecukupan menurut Dunn (2003) berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Dalam meninjau kriteria kecukupan, pada penelitian ini penulis memakai indikator dari rasa puas masyarakat. Hasil dari penelitian memperlihatkan dimana petani telah merasa puas dan meraih manfaat lewat penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Sungai Tarab disebabkan tidak ada lagi kelangkaan pupuk dan petani sudah mudah untuk mendapatkan pupuk.

Kecukupan pada aturan publik bisa dinyatakan apakah tujuan yang sudah diraih telah didapatkan dan dirasa cukup. Menurut Eka (2013) rasa puas dari masyarakat ialah suatu tanggapan, evaluasi dan taraf emosi masyarakat

akan layanan yang disajikan publik yang sudah dirasakan pada taraf hasil. Jika dikaitkan dengan penelitian kepuasan masyarakat merupakan respon petani akan pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi hasil dari penelitian memperlihatkan petani di Kecamatan Sungai Tarab merasa puas dengan adanya program penyaluran pupuk bersubsidi.

Hal ini sesuai terhadap hasil dari penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Winarta, Raka dan Sumanda (2020) bahwa kecukupan Dana Bansos Kabupaten Gianyar pada upaya pengatasan kesulitan primer masyarakat begitu memadai, disebabkan masyarakat merasa terbantu, dan kebijakan ini cocok dalam pengatasan tantangan masyarakat pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu Aisyah, Fachri dan Adil (2017) bahwa rasa cukup atas penyelenggaraan pendidikan gratis pada Kabupaten Pasaman telah dirasa mencukupi dan puas akan apa yang masyarakat butuhkan pada pendidikan.

#### d) Pemerataan

Hasil dari penelitian memperlihatkan dimana penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani pada Kecamatan Sungai Tarab sudah didistribusikan secara merata kepada kelompok sasaran yang mempunyai hak menerima pupuk bersubsidi yakni petani yang masuk pada kelompok tani dan masuk daftar pada RDKK dan pada pembelian pupuk memperlihatkan kartu identitas KTP dan KK.

Hal ini sejalan dengan pendapat Dunn (2003) pemerataan yakni apakah dana dan manfaat dibagikan dengan cara merata terhadap kelompok-kelompok yang tidak sama. Terdapat kesamaan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winarta, Raka dan Sumanda (2020) dimana pemerataan akan dana dan manfaat bantuan sosial yang dibagikan terhadap masyarakat pada Kabupaten Gianyar sama besarnya bagi seluruh kalangan masyarakat, masyarakat sekedar menyiapkan pemenuhan syarat yang sudah ditetapkan.

#### e) Responsifitas

Pada penelitian ini, penulis memakai indikator respon apratur. Hasil dari penelitian memperlihatkan dimana respon aparatur akan penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi ini begitu baik dan berusaha menjalankan program dengan baik, karena

program pupuk bersubsidi ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan produksi pertanian. Bisa dinyatakan dimana responsifitas penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani pada Kecamatan Sungai Tarab telah cukup baik.

Responsifitas pada aturan publik ialah tanggapan atau respon oleh objek yang disasar dari aturan publik akan sebuah ketetapan bisa dimaknai sebagai daya tanggap pihak yang memiliki keterlibatan yang melakukan penanganan akan sebuah aturan. Menurut Eka (2013) respon aparatur yakni respon yang timbul oleh aparatur yang menjadi pelaksana dari aturan. Apabila dihubungkan terhadap penelitian ini, maka bisa kita nyatakan dimana espon dari aparatur akan penyelenggaraan program pupuk bersubsidi ini telah baik.

#### f) Ketepatan

Hasil dari penelitian memperlihatkan dimana penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Sungai Tarab telah sangat tepat dan bermanfaat bagi petani, tidak ada lagi kelangkaan pupuk, pupuk sudah mudah didapatkan dan dapat dibeli di kios pengecer yang sudah ditentukan dan dengan adanya program ini dapat mengurangi biaya produksi petani.

Menurut Dunn (2003) ketepatan merupakan apakah tujuan yang diharapkan betul-betul mempunyai manfaat atau mempunyai nilai menyangkut terhadap efek yang timbul sesudah berlakunya aturan publik. Jika dikaitkan dengan penelitian ini akibat yang muncul dengan adanya penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Sungai Tarab telah sangat tepat dan memberikan manfaat bagi petani.

Hal ini sesuai terhadap penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Sri Wahyuni (2022) dimana untuk aturan pupuk bersubsidi telah sangat tepat diaplikasikan disebabkan aturan itu benar-benar memberikan pengaruh yang untuk petani dalam pemenuhan kebutuhan pertaniannya.

### **PENUTUP**

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan bisa diambil kesimpulan yang mencakup atas : Pertama, pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani pada Kecamatan Sungai Tarab bisa diambil kesimpulan dimana ada empat faktor yang mencakup atas komunikasi, sumberdaya, sikap

pelaksana dan struktur birokrasi. Tetapi hanya dua faktor yang sudah optimal yakni komunikasi dan struktur birokrasi. Faktor sumber daya belum optimal karena belum cukupnya sumber daya manusia dan anggaran. Pada faktor sikap pelaksana kinerja penyuluh pertanian perlu ditingkatkan lagi. Kedua, evaluasi penyelenggaraan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani pada Kecamatan Sungai Tarab bisa diambil kesimpulan belum maksimal. Karena terdapat enam kriteria evaluasi dan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, untuk kriteria kecukupan, pemerataan, resposifitas dan ketepatan sudah optimal. Namun untuk kriteria efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya belum optimal. Hal ini dikarenakan pada kriteria efektifitas belum seluruh tujuan tercapai. Terdapat tujuan 6 Tepat yakni tepat harga, kuantitas, waktu, jenis, kualitas, dan lokasi. Untuk tujuan tepat harga, jumlah dan waktu belum tercapai. Pada kriteria efisiensi belum terwujud karena belum cukupnya sumberdaya manusia dan sumber daya anggaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y. & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta
- Aisyah, Fachri & Adil. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pasaman. *Journal of Public Sector Innovation*. Vol.2, No. 1
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eka, Putri Silvia. 2013. *Evaluasi Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung* : Thesis
- Jorgi, R. S., Gayatri, S. & Dalmyiatun, T. (2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Semarang. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 5(2). doi: 10.18196/agr.5278.
- Ilham, Fachri & Nora. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Program Nus Sekolah Gratis oleh UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. *Ranah Research*. Vol.1 No. 2
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV Alfabeta
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021
- Wahyuni, Sri. 2022. *Evaluasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang*. Skripsi : Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar
- Winarta, Raka dan Sumanda. 2017. Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Public Inspiration*. Vol.5 No.1